

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Dalam Membaca Dan Menganalisis Anggaran Daerah

Saldi Julianto^{1*}, Muh Amirul Ichsan², Ummu Amaliyah³.

Universitas Muhammadiyah Makassar, saldijulianto12@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Makassar, amirulpoenya12@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Makassar,

Abstract

This research was conducted by taking the title increasing the competence of state administration students at Bosowa University in reading and analyzing budgets with the aim that students are expected to be able to know a lot about how to analyze and read regional budgets so that students are able to bring this knowledge into the world of work, not just for interest of student groups. To be the leading mouthpiece in criticizing the distribution of budgets in the regions the method of carrying out this research is by using training for students by presenting material using PPT while being explained by the presenters then students practice the material that has been presented in groups and then evaluated. The result of study show that student still do not know many things about regional budgets such as the budget cycle, where do regional revenues and expenditures come from, what is planning and budgeting. Students are still having difficulty in preparing the regional budget cycle from January to December.

Keywords: Budget Analysis, Competence Improvements, Regional Budget

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Dalam Membaca Dan Menganalisis Anggaran Daerah”. Dengan tujuan Mahasiswa di harapkan mampu mengetahui banyak tentang bagaimana menganalisis dan membaca anggaran daerah, Agar mahasiswa mampu membawa pengetahuan ini di dunia kerja. Bukan hanya sekedar kepentingan kelompok, Mahasiswa juga diharapkan untuk menjadi corong terdepan dalam mengkritisi pembagian anggaran dalam daerah. Metode pelaksanaan penelitian ini dengan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dengan cara memaparkan materi menggunakan PPT sembari dijelaskan oleh pemateri, selanjutnya mahasiswa mempraktekkan materi yang telah di paparkan secara berkelompok dan selanjutnya di evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mahasiswa masih belum mengetahui banyak hal tentang anggaran daerah seperti siklus anggaran, berasal dari mana pendapatan dan belanja daerah, apa itu perencanaan dan penganggaran. Mahasiswa masih sulit dalam penyusunan siklus anggaran daerah mulai dari Januari sampai Desember.

Kata Kunci : Analisis Anggaran, Peningkatan Kompetensi, Anggaran daerah

Received 17 February 2023

Revised 24 February 2023

Accepted 05 March 2023

How to Cite : Julianto, Saldi, et al (2023). Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa dalam Membaca dan Menganalisis Anggaran Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan Vol 3 No. 1 (page 7-20)*

PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Masyarakat menuntut adanya perubahan perbaikan di segala bidang, salah satu produknya adalah demokrasi. Tidak khayal jika kemudian lahir otonomi daerah, sebagai wujud runtuhnya sistem sentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan desentralisasi, di mana daerah mengatur dan mengurus sendiri pelaksanaan pemerintahan (Zami, 2020). Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien (Pattiasina et al., 2020). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan pemerintahan secara otonomi tidaklah berjalan dengan mulus, hal ini nampak banyak kasus-kasus korupsi yang menyanggung sebagian oknum dari kalangan pejabat pemerintah daerah, yang memanfaatkan kelemahan sistem desentralisasi. Tentunya kondisi di atas sangat memprihatinkan, bagaimana akan terselenggara pemerintahan yang baik, jika mulai dari tingkat pimpinan hingga bawahan secara berjamaah melakukan tindakan korupsi. Penerapan otonomi daerah diharapkan akan menciptakan sesuatu kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Untuk itu diperlukan aparat pemerintah yang cakap dan terampil untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan. Disisi lain, masih menjadi tanda tanya besar dikalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran pengawasan termaksud para pejabat pengawas yang berada di Inspektorat daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Anwar, 2021). Maka dari itu, Pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat. Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan (Hakim, 2019). Basniawati dalam (Azahra & Lubis, 2021) mengatakan bahwa Peranan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi

program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat (Anwar, 2021). Berawal dari ungkapan tersebut diatas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintah yang baik. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Undang Undang No 32 Tahun 2004 mengatur dengan jelas hak hak DPRD yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mempunyai hak, yaitu: Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat (Rossevelt et al., 2014). UU ini memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk kepentingan rakyat.

Anggaran daerah merupakan alat untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail mengenai pengeluaran pemerintah agar setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Mentang, 2020). Anggaran daerah dapat diartikan sebagai rencana keuangan daerah selama satu tahun tentang pengeluaran dan sumber pendapatannya (Jais, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan etonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Rahma, 2020). Menurut Madiasmo dalam (Wance, 2019) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Adapun fungsi anggaran menurut Halim dan Kusufi dalam (E. N. Sari, 2021) yaitu Anggaran sebagai alat perencanaan, Anggaran sebagai alat pengendalian Anggaran, Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, Anggaran sebagai alat politik, Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Setiap, Anggaran sebagai alat penilaian kinerja Dalam, Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran, dan Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik Anggaran. anggaran belanja adalah suatu rencana yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang khusus tentang apa-apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh unit organisasi yang menyusun anggaran tersebut pada periode waktu yang akan datang. Mardiasmo dalam (Dwiputrianti, 2012) mengemukakan tentang definisi dalam sistem penyusunan anggaran merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah, diantaranya yaitu

aspek utama budgeting reform merupakan perubahan dari tradisional *budget* ke *performance* bersifat *line item* dan *incrementalism* yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekwensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat.

Anggaran merupakan aspek yang sangat vital dalam proses pembangunan Daerah. Namun demikian, masih banyak praktek pengelolaan anggaran yang secara kasat mata, belum tepat sasaran atau tidak mencapai tujuan yang dikehendaki (Jais, 2019). Lambatnya penyerapan anggaran pada pemerintah daerah menjadi salah satu masalah klasik, yang terus terjadi setiap tahunnya. Penyerapan anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat). Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Anisa & Banten, 2017). Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (*idle money*). Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Untuk melihat keefesienan serta keefektifitas yang berasal dari pemerintahan daerah, maka bisa dilihat kinerja tersebut melalui laporan realisasi anggaran. Didalam laporan ini bisa menjelaskan mengenai bandingan antara anggaran dengan realisasi didalam sebuah waktu pelaporan, tujuan dari laporan ini yaitu memberikan informasi mengenai realisasi serta anggaran entitas pelaporan secara tersanding Karim dan Sahabuddin dalam (P. Sari & Baku, 2022). Dengan kegiatan penyandingan antara anggaran serta realisasi bisa mengarahkan kepada tingkatan tercapainya target yang sudah di sepakati antara eksekutif dan legislatif yang sudah sesuai dengan peraturan yang diatur diundang-undang. Laporan realisasi anggaran terdiri atas: (1) Income (pendapatan); (2) transfer; (3) Pembelanjaan; (4) Defisit; (5) Penerimaan pembiayaan; (6) Pengeluaran pembiayaan; (7) Pembiayaan bersih; dan (8) Sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) (P. Sari & Baku, 2022).

Anggaran daerah merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari suatu kegiatan perencanaan dalam organisasi dan anggaran harus benar-benar dirancang sebaik mungkin agar semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai anggaran dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Anggaran yang efektif membutuhkan kemampuan memprediksi masa depan, yang meliputi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Umarella, 2019). Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat

pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga (Batubara, 2022).

Namun demikian dalam pengelolaan APBD diperlukan suatu kerangka kerja yang terpadu dan optimal sehingga melahirkan tata kelola anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip “Good and Clean Governance”. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan baik, transparan dan partisipatif yang akan melahirkan suatu bentuk pelaksanaan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersih, professional serta mengabdikan diri sepenuhnya bagi kepentingan masyarakatnya (Jais, 2019). Konstitusi pasal 23 UUD 1945 mengamanahkan serta mengatur dengan jelas dan tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan Anggaran. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bappenas. Menciptakan orientasi anggaran ke arah kesejahteraan rakyat diperlukan penganggaran yang partisipatif (Participatory Budgeting). Participatory Budgeting (PB) adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan (Safi, Indien Winarwati, 2015). banyak para pakar maupun praktisi mengemukakan pemikiran tentang prinsip dari pemerintahan yang baik, yang pada hakekatnya masing-masing prinsip mempunyai ketekaitan satu sama lain yang sangat kuat oleh karena itu cukup sulit untuk menarik garis perbedaan yang tegas dari masing-masing prinsip tersebut. Menurut UNDP dalam (Jais, 2019) terdapat Sembilan prinsip-prinsip *good governance* yaitu, partisipasi, taat hukum (rule of law), transparansi, responsif, berorientasi, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Anggaran dapat berhasil dilaksanakan apabila di dalamnya terdapat dasar- dasar anggaran yakni Adanya dorongan yang kuat dari top manajemen terhadap program penganggaran dan harus ada kerjasama diantara para pemimpin/manejer, Harus ada kejelasan wewenang tanggung jawab pada setiap tingkatan manajemen, Penetapan periode anggaran (Umarella, 2019). Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. (Firmansyah et al., 2022).

Maka dari itu, tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini Mahasiswa sangat di harapkan mampu mengetahui banyak tentang bagaimana menganalisis dan membaca anggaran, Agar mahasiswa mampu membawa pengetahuan ini didunia kerja. Tujuan belajar adalah bagaimana menganalisis dan membaca serta penyusunan anggaran daerah. Bukan hanya sekedar kepentingan kelompok Diharapkan mahasiswa untuk menjadi corong terdepan dalam mengkritisi pembagian anggaran dalam daerah.

METODE

Pelatihan peningkatan kompetensi mahasiswa tentang membaca dan menganalisis anggaran daerah dilaksanakan di Auditorium Aksa Mahmud dari Universitas Bosowa secara offline selama 2 hari yaitu pada tanggal 21-22 November 2022, yang pesertanya terdiri dari 30 orang mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019, 2020, dan 2022. Mekanisme kegiatan ini di mulai dengan sambutan-sambutan oleh Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan di lanjutkan pembukaan oleh dekan fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Metode yang digunakan dalam pemberian pelatihan membaca dan menganalisis anggaran yaitu, 1) pemateri menjelaskan dan memaparkan materi melalui PPT tentang cara membaca dan menganalisis anggaran. 2) Metode Tutorial dan Praktik, dimana narasumber membagi peserta menjadi beberapa kelompok dan peserta tersebut menyusun tahapan-tahapan pendapatan daerah serta siklus anggaran daerah. 3) Metode diskusi, peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang telah disusun menggunakan kertas plano yang kepada kelompok lain. 4) Metode Evaluasi, dimana Narasumber membuktikan apakah jawaban yang disusun peserta benar atau salah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah peserta diberikan *pretest* sebagai awal dari pelatihan tersebut untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mahasiswa ilmu administrasi Negara Universitas Bosowa terkait dengan perencanaan dan penganggaran di daerah serta melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes dan RPJMD. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 21-22 November 2022 di auditorium Aksa Mahmud Universitas Bosowa. Selanjutnya peserta diberikan materi awal adalah Hakekat Anggaran sehingga diketahui bagaimana hak rakyat atas anggaran yaitu untuk menjamin dipenuhinya hak rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya peserta diberikan materi terkait Regulasi perencanaan dan penganggaran, kemudian menyusun siklus perencanaan dan penganggaran, pengenalan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, struktur anggaran daerah/desa (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya mahasiswa dibekali teknik dan trik dalam menganalisis anggaran, dan melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa menggunakan *Opentender.net* dan terakhir simulasi kasus *Opentender*. Selama pelatihan, tampak bahwa peserta mulai mengetahui bagaimana fungsi anggaran yaitu dilihat dari kemampuan peserta menjawab pertanyaan dari pemateri dan games yang dilaksanakan.

2. Deskripsi Sasaran

Berdasarkan kebutuhan mahasiswa perlu diadakan suatu kegiatan pelatihan yang memberikan alternatif dalam mengajarkan dan mempelajari bagaimana membaca dan menganalisis serta menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara mudah dan menyenangkan. Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa merupakan sebuah program studi yang melaksanakan kegiatan Pusjaga (Pusat Belajar Anggaran) tingkat dasar. Kegiatan pengembangan ini dilakukan pada tanggal 21-22 November 2022 dan hasil pengembangan ini tentu perlu disebarluaskan kepada masyarakat khususnya yang belum memahami terkait dengan anggaran.

Kegiatan ini pelatihan ini menjadi harapan besar mahasiswa ilmu administrasi Negara dalam meningkatkan *soft skill* dan *Hard skill*. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada mahasiswa ini berorientasi kepada pelatihan. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan. Pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan.

Dengan demikian, pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas, tidak terbatas hanya untuk mengembangkan keterampilan semata-mata tetapi pelatihan sebagai proses sistematis di mana peserta mempelajari pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), kemampuan (ability).

a. Analisis Hasil kegiatan

Mahasiswa sebagai bagian dari pengawas partisipatif anggaran di tuntut untuk mengetahui secara luas tentang anggaran daerah. Proses ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada mahasiswa mengenai sumber anggaran.



Gambar 1 . Penjelasan Mengenai Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Secara tidak langsung masyarakat ikut berkontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah Seperti :Pajak, Retribusi, Laba BUMD, Pinjaman/ hutang dan Dana hibah. Sehingga dengan hasil tersebut digunakan sebagai sumber pendapatan daerah. Mengapa Negara hadir karena untuk mengelolah uang yang dipungut dari rakyat, untuk Menjamin Hak – Hak Rakyat, Untuk Menciptakan Keteraturan Sosial, Menyelenggarakan Pelayanan kepada Masyarakat, Untuk Menjamin Dipenuhinya Hak Rakyat, Untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat, Untuk Membiayai Pelayanan kepada Masyarakat.



Gambar 2. Pemberian Materi kepada peserta

Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, yaitu dalam mendengarkan dan berdiskusi tentang dari mana sumber anggaran. Disamping itu, dalam kegiatan pelatihan membaca dan menganalisis anggaran daerah mahasiswa ikut berpartisipasi aktif, sehingga mereka benar-benar memahami dari mana sumber anggaran. Narasumber menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang anggaran sebab anggaran daerah seringkali menjadi bagian yang selalu dikorupsi oleh para pejabat, sehingga masyarakat tidak bias merasakan secara penuh anggaran yang peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dimungkinkan untuk pro terhadap kemiskinan karena Data BPS Juli 2022 mencatat jumlah penduduk miskin 9,54% dari total penduduk Indonesia. Rakyat pedesaan sebanyak 14,43%. Memasuki tahun 2022 gejala kemiskinan masal di Indonesia nampaknya belum sepenuhnya bisa diatasi, Kemiskinan rakyat pedesaan/perkotaan tidak semata disebabkan oleh kurangnya modal agregat. Akan tetapi lebih disebabkan oleh karena: Tidak meratanya penguasaan aset (modal) produksi, Kurangnya akses masyarakat miskin pada kebijakan penganggaran. (tidak ikut musrenbang, Program anti kemiskinan didesain untuk orang harus miskin dulu agar dapat memanfaatkan program dan Tiga variabel faktor kemiskinan itu tentu berkait erat

dengan tata kelola anggaran di tingkat daerah. Karena itu paradigma anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (*pro poor budget*) menjadi mendesak dan penting

Anggaran *pro poor* (Anggaran yang berpihak pada orang miskin) : suatu gagasan yang mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada si miskin. praktek penyusunan dan kebijakan dibidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Dan kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Substansi anggaran *pro poor* memiliki kesamaan dengan *people-oriented budget* atau anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Prinsip-Prinsip Anggaran *Pro Poor* yaitu Mengelola anggaran secara transparan, akuntabel dan partisipatif, Melibatkan public dalam semua aspek yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran, Menggunakan prinsip keadilan anggaran (efisien, efektif, ekonomi, dan equity/berkeadilan) serta Berbasiskan pada ukuran kinerja, setiap program, proyek, dan kegiatan harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur.

Selain itu mahasiswa diberikan penjelasan mengenai siklus perencanaan dan penganggaran mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD DAN RENJA. Dan pengenalan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



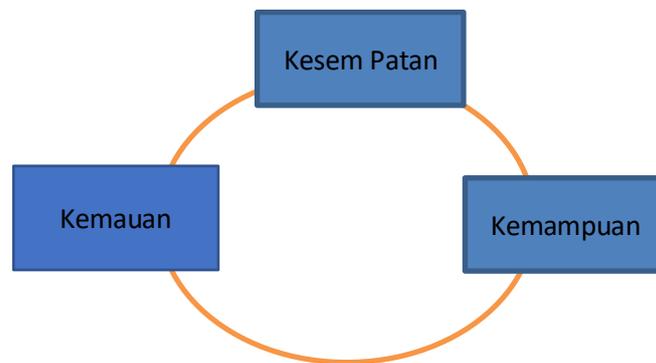
Gambar 3 . Penjelasan Peta Anggaran oleh Narasumber

Mahasiswa diberikan kesempatan yang terbagi kedalam 5 kelompok untuk menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran mulai bulan januari sampai desember atau mulai dari musrembang desa/kelurahan sampai penetapan Perda APBD dan DPA-OPD serta mengukur sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga partisipasi aktif masyarakat dapat terlihat menurut UU yaitu Musrembang desa/kelurahan, musrembang kecamatan, Forum OPD, rencana kerja OPD sampai Musrembang RKPD tetapi realitas yang terjadi keterlibatan atau partisipasi masyarakat hanya sampai pada musrembang kecamatan selanjutnya hanya orang-orang tertentu yang bertatap muka sampai pada musrembang RKPD sehingga ini yang kemudian menjadi problem yang terjadi sampai saat ini.

Kemudian daripada itu Problem pengelolaan keuangan di daerah menjadi alasan sehingga pembangunan daerah termasuk Pendidikan, kesejahteraan masyarakat miskin dan disabilitas menjadi lambat karena :Rendahnya PAD, Formula kebijakan pajak dan retribusi daerah, Kesulitan dalam mengelola BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). DAU (Dana Alokasi Umum) lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai. Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) belum mampu merespon kebutuhan daerah untuk mendukung pelayanan publik. Dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana hibah, dan dana pinjaman di daerah menghadapi persoalan transparansi dan akuntabilitas yang menyulitkan efektivitas dana-dana ini dalam mendukung penyediaan pelayanan publik, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Kebijakan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan terutama dalam dokumen APBD, juga masih sulit untuk diukur tingkat kecukupannya. Di hampir seluruh daerah, struktur APBD masih menunjukkan alokasi anggaran untuk aparatur yang lebih besar dari alokasi untuk belanja publik. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD sering dikritik (belum melibatkan partisipasi warga terutama dari kalangan miskin), Penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, dan pengelolaan asset daerah menjadi aspek-aspek yang jauh dari kontrol public, Monitoring dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih belum efektif berjalan. Selain ada masalah pada kinerja lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah, belum maksimalnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi budgetingnya, tidak optimalnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pengelolaan keuangan daerah menyumbang pada gagalnya fungsi pengelolaan keuangan daerah sebagai instrument untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah.

Partisipasi masyarakat dan mahasiswa sangat dibutuhkan dalam menjadi bagian dari pengelolaan keuangan di daerah, karena keterlibatan aktif mereka dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa partisipasi tidak akan terjadi secara maksimal tanpa terpenuhinya tiga unsur utama,

yaitu kesempatan, kemampuan, dan kemauan. Kesempatan merujuk pada adanya ruang yang terbuka dan akses yang setara bagi masyarakat dan mahasiswa untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan anggaran daerah. Kemampuan menyangkut pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami struktur dan mekanisme keuangan daerah, sehingga partisipasi yang diberikan bersifat informatif dan konstruktif. Sementara itu, kemauan adalah dorongan internal atau motivasi yang berasal dari kesadaran akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pengelolaan keuangan publik. Ketika ketiga unsur ini—kesempatan, kemampuan, dan kemauan—berjalan seiring, maka partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar mampu mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.



Gambar 4 . Unsur Penting dalam Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat atau individu dalam suatu kegiatan, khususnya dalam konteks pemerintahan, pembangunan, atau pengambilan keputusan publik, hanya dapat terwujud secara optimal apabila tiga unsur utama partisipasi terpenuhi secara bersamaan, yaitu adanya kesempatan, kemampuan, dan kemauan. Kesempatan mengacu pada tersedianya ruang atau akses bagi individu atau kelompok untuk terlibat secara aktif, sehingga tanpa adanya kesempatan yang terbuka dan inklusif, individu tidak memiliki jalan untuk menyuarakan pendapat atau mengambil bagian dalam proses yang sedang berlangsung. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai agar seseorang benar-benar bisa berkontribusi secara substansial dalam kegiatan tersebut, bukan hanya sekadar hadir secara simbolik. Sementara itu, kemauan adalah aspek internal yang mencerminkan motivasi dan kesadaran individu untuk terlibat secara aktif, yang tanpanya partisipasi menjadi tidak bermakna. Ketiga unsur ini bersifat saling melengkapi dan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya partisipasi yang efektif. Jika salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi—misalnya seseorang memiliki kemauan dan kemampuan tetapi tidak diberikan kesempatan, atau sebaliknya, memiliki kesempatan tetapi tidak disertai kemampuan dan

kemauan—maka partisipasi yang terjadi tidak akan maksimal dan cenderung menjadi partisipasi yang semu atau setengah hati. Oleh karena itu, terpenuhinya ketiga unsur ini menjadi dasar yang penting dalam mendorong partisipasi yang bermakna, konstruktif, dan berkelanjutan dalam setiap proses sosial, politik, maupun pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FISIP Universitas Bosowa masih kurang memahami berbagai aspek terkait anggaran daerah, seperti siklus anggaran, komponen pendapatan dan belanja daerah, serta proses perencanaan dan penganggaran. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi fiskal di kalangan mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan publik. Melalui pelatihan yang telah diselenggarakan, terjadi peningkatan kapasitas pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam memahami serta menyusun perencanaan dan penganggaran daerah, hingga pada tahap pengawasan barang dan jasa secara transparan melalui platform **Opentender.net**.

Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur, tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Pelatihan ini penting sebagai sarana edukasi publik dalam memahami hakikat anggaran daerah, termasuk mengetahui untuk apa anggaran digunakan dan bagaimana proses pengelolannya. Dengan demikian, diharapkan tercipta generasi yang lebih sadar anggaran dan mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasan serta perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, I. Z., & Banten, B. U. P. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2(1), 84–101.
- Anwar, M. S. S. (2021). Peran Inspektorat Sebagai Badan Pengawasan Anggaran Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Parepare). *Journal AK-99*, 1(2), 55–63.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245.
- Batubara, H. (2022). Analisis perencanaan anggaran pendapatan belanja pendidikan. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269.
- Dwiputrianti, S. (2012). analisis penerapan anggaran berbasis kinerja (abk) terhadap efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada pusat pendidikan dan pelatihan kementerian dalam negeri regional bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(3), 309–329.
- Firmansyah, A., Yuniar, muhamad rizal, & Arfiansyah, Z. (2022). *Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah*. 4(2).
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 3(2), 97–109.
- Jais, A. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Gerbang Etam*, 13(1).
- Mentang, F. J. dkk. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 131–138.
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Patiran, A., & Bonsapia, M. (2020). Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(2), 179–194.
- Rahma, S. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Tebo). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7), 397–403.
- Safi, Indien Winarwati, E. R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Apbd Di Kabupaten Bangkalan. *Yustisia*, 4(2), 397–415.
- Sari, E. N. (2021). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*.
- Sari, P., & Baku, A. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 395–406.
- Umarella, B. (2019). Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada Pt X Di Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 01(02), 2–3.

- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 5(1), 1-17.
- Zami, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 121-130. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.187>